

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian di Indonesia secara umum ada yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, atau sering disebut dengan istilah perjanjian bernama (*benoemd/nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*). Pengertian perjanjian bernama (*benoemd/nominaat*) adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaturannya terdapat dalam Buku III KUH Perdata, Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*) pengertiannya adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.¹ Lahirnya perjanjian tidak bernama dimungkinkan karena Buku III KUH Perdata mempunyai sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, seperti diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Cet I* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 67.

yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek, dan adanya kausa halal mutlak harus terpenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah secara hukum. Beberapa contoh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, franchise, leasing, konsinyasi, dan masih banyak lagi perjanjian tidak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia.

Dalam perkembangannya, perjanjian yang juga banyak digunakan oleh para pengusaha, pebisnis, dan pelaku usaha lainnya adalah perjanjian konsinyasi, yaitu perjanjian dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian.² Perjanjian konsinyasi bisa juga disebut perjanjian titip jual. Dalam perjanjian ini ada kerjasama yang lebih menguntungkan bagi para pihak, baik pihak yang menitipkan maupun pihak yang menjualkan. Bagi pihak yang menitipkan tidak perlu membuka tempat sendiri untuk menjual barang atau produknya, sedangkan dari pihak yang menjualkan tidak perlu mengeluarkan dana terlebih dahulu untuk mendapatkan barang atau produk yang akan dijual.

Perjanjian konsinyasi juga dilaksanakan oleh para *breeder* anjing ras dalam memasarkan atau menjual koleksi-koleksi hasil dari pembiakan dengan cara menitipjualkan kepada toko-toko penjual binatang dan segala keperluannya atau sering disebut dengan istilah *pet shop*, salah satunya adalah *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*. Para *breeder* menitipkan anjing ras sebagai

² <http://akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel-453.html>, 11 Maret 2013.

produk dari pembiakannya untuk dijualkan oleh *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, yang tentunya mempunyai kesepakatan dalam perhitungan bagi hasil atau bagi keuntungan. Dalam prakteknya, perjanjian konsinyasi dirasakan sangat menguntungkan baik pihak *breeder* maupun pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*. Namun masih terdapat kekurangan maupun celah-celah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik pada saat perjanjian konsinyasi tersebut masih berlangsung maupun setelah anjing ras tersebut laku terjual, karena klausula-klausula mengenai hak dan kewajiban para pihak biasanya tidak diatur secara rinci dan tegas dalam perjanjian konsinyasi tersebut.

Permasalahan yang timbul dari perjanjian konsinyasi di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* yaitu adanya anjing ras yang sakit atau bahkan mati karena adanya unsur kelalaian dan/atau wanprestasi dari pihak *pet shop* khususnya di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*. Permasalahan yang lain yaitu anjing ras yang dititip jualkan oleh *breeder* kepada pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* ada yang memiliki kelainan yang belum atau memang tidak terlihat.

Dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktek titip jual anjing ras tersebut, maka perlu adanya penelitian secara lebih rinci, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan anjing ras di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, sehingga penelitian ini diberi judul Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan Anjing Ras Di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum akibat adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum akibat adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui cara penyelesaian hukum akibat adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui cara penyelesaian hukum akibat adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualkan di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan ilmu hukum ekonomi dan bisnis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi para *breeder* anjing ras yang akan menitipjuaikan anjing rasnya ke *pet shop* pada umumnya dan *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta pada khususnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan perjanjian konsinyasi pada umumnya dan pelaksanaan perjanjian konsinyasi di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta pada khususnya, yang tentunya agar pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik, saling menguntungkan para pihak, dan mencegah adanya permasalahan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dan merupakan eksplorasi terhadap berbagai hal yang terkait dengan ide asli yang kemudian diuraikan dalam pembahasan. Namun tema dalam penelitian ini sudah pernah digunakan antara lain:

1. Nama : Anung Susanto
- NPM : 98 05 06594
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas : Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Judul : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Konsinyasi Di Easy Minimarket Yogyakarta.

Rumusan Masalah : Apa akibatnya jika kemasan produk/barang yang dititip-jualkan oleh *supplier* di Easy Minimarket ada cacat tersembunyi?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apa akibatnya jika kemasan produk/barang yang dititip-jualkan oleh *supplier* di Easy Minimarket ada cacat tersembunyi.

Hasil Penelitian : Kerusakan atas barang yang dijual di Easy Minimarket dengan *system* konsinyasi menjadi tanggung jawab *supplier*. Ketentuan yang demikian merupakan bagian isi perjanjian, dan isi yang demikian itu tidaklah menyimpang dari sifat aturan hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata sebagai hukum pelengkap yang *aanvullendrecht*.

2. Nama : Anwar Arjanto

NPM : 07 05 09587

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Fakultas : Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta?

2. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak tentang resiko dan kelalaian, dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara lisan di Mirota Batik Kaliurang?

Tujuan Penelitian : 1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta.

2. Mengetahui pengaturan hak dan kewajiban para pihak tentang resiko dan kelalaian, dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara lisan di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta.

Hasil Penelitian : 1. Pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta sudah cukup baik, namun belum memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya apabila terjadi suatu permasalahan seperti cara pembayaran, masalah kerugian dan resiko para pihak akibat kelalaian yang tak terduga karena tidak ada perjanjian tertulis diantara para pihak.

2. Pengaturan hak dan kewajiban para pihak tentang resiko dan kelalaian, dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara

lisan di Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta sudah cukup baik, namun bagi para *supplier* masih kurang menjamin hak-hak para *supplier* karena mengenai cara pembayaran, pemberian potongan harga, dan retur barang kurang menguntungkan pihak *supplier* terutama bila ada *overmacht* dan resiko lebih dibebankan pada *supplier*, meskipun ada itikad baik dari Mirota Batik Kaliurang Yogyakarta.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis yuridis tentang pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara *breeder* anjing ras dengan pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta berkaitan dengan proses titip jual anjing ras. Analisis tentang konsinyasi pada *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta sejauh yang diketahui belum pernah diadakan suatu penelitian. Dengan demikian penelitian ini merupakan hasil karya asli, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya penulisan orang lain.

Apabila ada kesamaan dengan penelitian yang lainnya seperti topik yang diteliti, pengertian, dan teori-teori hukumnya tentu terdapat perbedaan di dalam melakukan penelitian, baik dari sudut pandang penelitian, metode penelitian serta sumber dan data yang berbeda pula, sehingga penelitian dan penulisan hukum ini dapat bersifat menambahkan dan/atau melengkapi.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³

2. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst/innominaat*)

Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst/innominaat*) adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.⁴

3. Konsinyasi

Konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian jual titip, setiap barang yang telah terjual jumlah hasil penjualan barang tersebut disetor pada pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati.⁵

4. *Breeder*

Breeder adalah pembiak, peternak atau orang yang membiakkan dengan sengaja (dalam hal ini anjing ras) untuk tujuan tertentu. Dalam praktek sehari-hari di lingkungan masyarakat Indonesia *Breeder* lebih dikenal dengan sebutan peternak. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.⁶

³ Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. XXIX, terjemahan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), hlm. 338.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit.*

⁵ Kamus Hukum Lengkap Internasional-Indonesia, (PT. Wacana Intelektual Press, 2007), hlm. 261-262.

⁶ Indonesia, *pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, (LN Tahun 2009 No. 84, TLN No. 5015).

5. Anjing Ras

Anjing Ras adalah kelompok-kelompok anjing peliharaan yang berkerabat dekat dan memiliki penampilan yang sama. Semuanya berasal dari satu spesies, yakni *canis lupus familiaris*. Ciri-ciri setiap ras dipilih dan dijaga oleh manusia, serta dibiakkan dari bibit dasar yang diketahui. Anjing disebut anjing trah bila kedua induknya anjing trah dan memenuhi standar suatu ras anjing.⁷

6. Pet Gallery Sagan Yogyakarta

Pet Gallery Sagan Yogyakarta adalah salah satu toko penjual binatang dan segala keperluannya yang ada di wilayah Sagan Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Ras_anjing, 10 Maret 2013.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data primer sebagai data utama, dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh secara langsung dari responden yaitu *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* dan 5 orang *breeder* anjing ras yang berdomisili di Yogyakarta dan yang pernah menitipjalkan anjing rasnya di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan,
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

e) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2) Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, kamus, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu kepada responden, dan dengan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara dengan responden.
- b. Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur guna mendapatkan landasan teoritis dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan ini di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta, karena merupakan salah satu *pet shop* yang ada, berkembang dan besar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta sudah lama bergerak dalam penjualan binatang peliharaan dalam hal ini adalah anjing ras dan segala keperluannya, dan terutama sudah sering menjalin kerjasama dengan para *breeder* dalam menjalankan usahanya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang *breeder* yang menitipjualkan anjing ras sebagai barang atau produk dari hasil pembiakannya di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta.

6. Responden dan Narasumber

Responden dari penelitian ini adalah para *breeder* sebagai yang menitipjualkan anjing ras sebagai barang atau produk dari hasil pembiakannya di *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta dan pihak *Pet Gallery* Sagan Yogyakarta sebagai yang menjualkan dalam perjanjian konsinyasi tersebut.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analisis*) dengan langkah-langkah yaitu data diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, hasilnya disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini teknik pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dimana pendekatan ini menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.